

## Jokowi Bertemu Tito Karnavian, untuk Bahas soal DOB Papua

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (3/11). Salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu adalah soal daerah otonomi baru (DOB) Papua. Demikian dikatakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan. "Hari ini, Mendagri menghadiri rapat terbatas dengan menteri-menteri terkait. Dipimpin Bapak Presiden," ujar Benny saat dikonfirmasi, Kamis (3/11).

Benny kemudian mengatakan bahwa saat ini persiapan DOB Papua sudah mendekati 100 persen. Namun, Kemendagri disebut belum dapat memastikan kapan peresmian tiga DOB akan dilakukan.

"(Persiapan peresmian) mendekati 100 persen. Karena sudah disiapkan beberapa bulan lalu. Beberapa aspek bisa dikatakan siap," kata Benny.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo memastikan bahwa peresmian tiga DOB di Papua, mundur hingga awal November 2022. Wetipo sebelumnya pernah menyampaikan peresmian Provinsi Papua

Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Tengah, akan dilakukan pada akhir Oktober 2022.

"Harapan kita sebenarnya akhir bulan ini tetapi waktu terlalu mepet, jadi kita harap kalau tidak ada perubahan itu sebelum 10 November jadi itu sekaligus peresmian DOB dan Pj (Penjabat) dilantik," ujar Wetipo di Jayapura, Jumat (28/10) lalu.

Wetipo berharap penunjukan Pj Gubernur di tiga provinsi baru itu bisa dilakukan dalam waktu dekat. Kemendagri disebut sudah siap mengirim nama kandidat yang cocok ke Presiden Jokowi.

"Saya meminta laporan dari semua Pokja mengenai persiapan (DOB) karena Senin (31/10) nama-nama calon Pj akan kita masukkan ke Pak Presiden," katanya.

Terkait adanya polemik lokasi peresmian DOB, Wetipo menegaskan, pelaksanaannya akan dilakukan di tempat netral agar tidak menimbulkan keceburuan antarkelompok.

"Kegiatan akan dipusatkan di Jakarta. Nanti, pada saat penyambutan Pj Gubernur, DOB-nya mau buat penyambutan silakan," ujar Wetipo. ■ han

## Selain Marak Baliho Anies-Aher, Kini Bermunculan Relawan Anies-AHY

JAKARTA (IM) - Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Renanda Bachtar menanggapi santai kemunculan baliho bertuliskan "Bersatu Bersama untuk Indonesia Anies-Aher 2024" di Solo, Jawa Tengah. Renanda malah menyebut kini sudah terbentuk relawan Anies - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di sejumlah daerah di Indonesia.

"Bahkan sudah sampai Pontianak, Kalimantan Barat, Ambon, Maluku, bukan hanya kota-kota besar di Jawa dan Sumatera," ujar Renanda dalam keterangannya, Kamis (3/11).

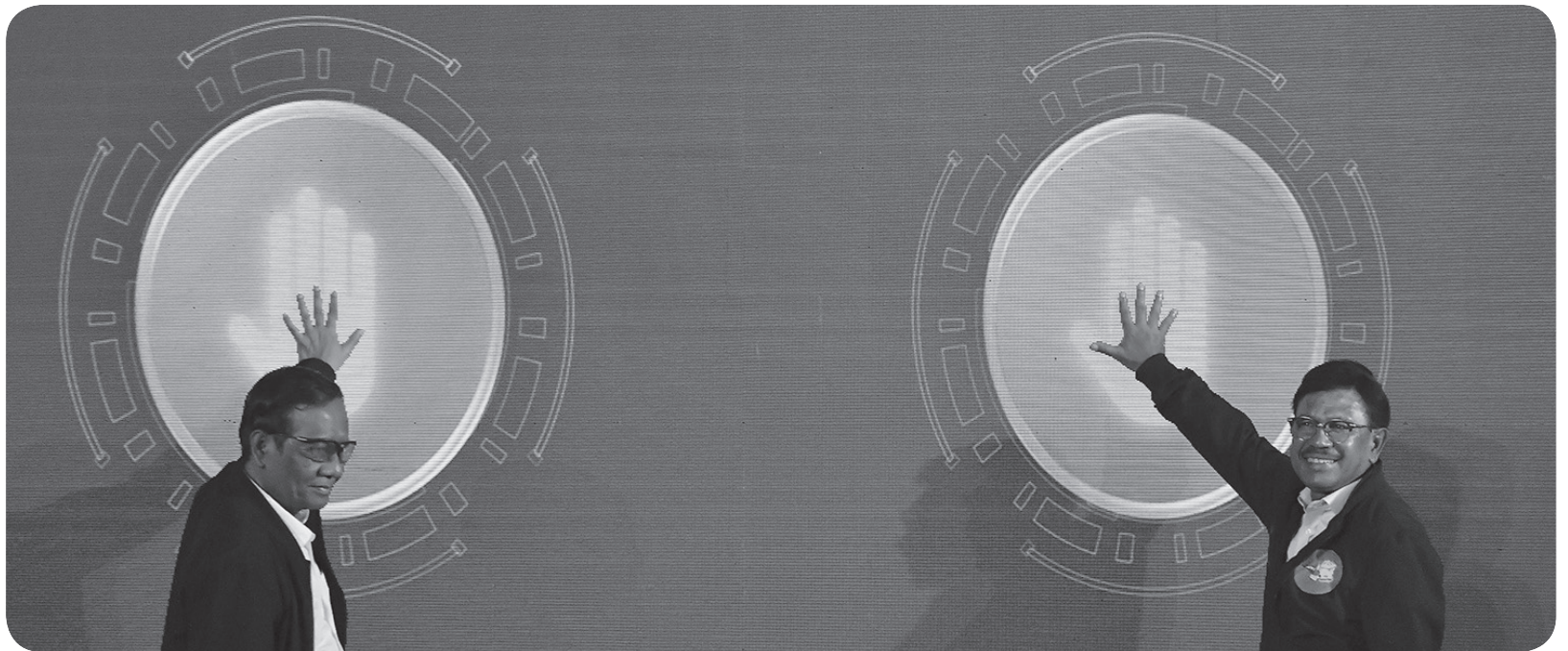
Deklarasi para relawan itu disebut bagian aspirasi untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan Indonesia di masa depan. Ia memandang Anies, Ahmad Heryawan, dan AHY merupakan tokoh yang diharapkan membawa perubahan. Kemunculan baliho dan relawan dinilai sebagai inisiatif masyarakat. "Aspirasi publik yang terus meluas ini menunjukkan kuatnya angin perubahan yang didorong oleh masyarakat akar rumput, bukan sekedar agenda elite," tuturnya.

Terakhir, ia menyampaikan bahwa situasi ini menjadi indikasi bahwa banyak pihak ingin koalisi perubahan segera terbentuk. Pembentukan koalisi itu tengah dipajaki oleh Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem.

"Ini semakin menguatkan motivasi kami untuk terus konsisten bersama rakyat memajukan perubahan dan perbaikan," ujarnya.

Diketahui baliho Anies-Aher muncul di Kota Solo, Jawa Tengah sejak Senin (1/11). Baliho berwarna ungu gelap itu bertuliskan "Bersatu Bersama untuk Indonesia Anies-Aher 2024". Juru Bicara PKS M Kholid menegaskan, kemunculan baliho itu tidak ada kaitannya dengan PKS. Namun, ia tidak keberatan dengan kemunculan baliho tersebut dan menganggap hal itu sebagai bagian dari demokrasi yang harus dihargai. "Menurut hemat saya sebagai ekspresi demokrasi warga itu wajar saja. Ada harapan dari warga untuk mendukung pilihannya. Kreativitas dari warga kita hormati," terang Kholid saat dihubungi, Rabu (2/11). ■ mei

# 2 | Polhukam



### PENGHENTIAN SIARAN TV ANALOG

Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) bersama Menkominfo Johnny G Plate (kanan) melakukan prosesi penghentian siaran televisi analog di Jakarta, Kamis (3/11) dini hari. Kementerian Kominfo menghentikan siaran televisi analog atau Analog Switch Off (ASO) pada 3 November 2022 pukul 00.00 WIB di Jabodetabek untuk mewujudkan tranformasi digital.

## Warga Merasa Terbebani Setelah Pemerintah Hentikan Siaran TV Analog

Pemerintah resmi hentikan siaran TV analog dan beralih kesiaran digital. Banyak warga keberatan karena terpaksa membeli perangkat STB lagi.

JAKARTA (IM) - Sejumlah warga merasa keberatan atas kebijakan pemerintah menghentikan siaran TV analog atau analog switch off (ASO). Seperti diketahui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menghentikan siaran TV analog sejak Rabu (2/11) pukul 24.00 WIB.

Sejumlah warga Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, merasa terbebani untuk membeli perangkat TV digital, mengingat televisi di rumahnya belum memiliki Set Top Box (STB).

Zaini (59), warga RT 07 Susukan, Ciracas, mengaku keberatan dengan penerapan kebijakan TV digital tersebut.

"Saya sangat tidak setuju (TV digital), soalnya kan harus memakai STB, jadinya kan terbebani. Baiknya penerapan TV digital itu buat masyarakat yang mampu saja dulu. Kalau bagi yang belum mampu, sebaiknya pakai TV yang biasa saja (analog)," jelas Zaini, Kamis (3/11).

Menurut Zaini, dia sempat ditawarkan untuk membeli STB dari sejumlah orang yang

dikenalnya. Dia mengatakan harga STB yang diminta sekira Rp250 ribu.

"Jangankan Rp250 ribu, kalau harganya Rp150 ribu yang diwajibkan saja, banyak yang mengeluh. Soalnya kan sekarang harus wajib dibeli cuma buat nonton TV saja kan. Kasihan kan orang yang tidak mampu, apalagi kalau dipaksakan oleh pemerintah, kita kan masih ada kebutuhan penting yang lain," terang Zaini.

Sementara itu, warga RT 05 Susukan, Ciracas, Herlina (47) pun mengaku keberatan dengan dimatikannya siaran TV analog. Ia merasa kecewa karena TV tabungnya tidak lagi bisa menyiarkan saluran televisi favoritnya.

"Yaa seharusnya nanti saja lah, sabar dulu. Namanya kita belum punya alatnya, jadinya repot kan. Semalam tayangan

TV masih bagus-bagus, pagi ini hilang semua," kata Herlina.

Herlina mengaku tayangan favoritnya ada di dua saluran televisi swasta, yakni RCTI dan Indosiar. Meski ia mengaku bersyukur karena RCTI masih bisa ditayangkan via TV analog, tetapi kekecewaannya tidak bisa dipungkiri.

"Yaa ini ngerepotin sebenarnya. Apalagi saya cuma ikut anak sekarang tinggalnya. Kan ga enak kalau buat nonton TV, harus beli alat tambahannya," ujar Herlina.

"Saya jujur kaget, semalam masih terang tayangannya, lah ini paginya jadi banyak yang hilang. Kaget saya," lanjut Herlina.

Untuk diketahui, Pemerintah resmi menghentikan siaran TV Analog atau Analog Switch Off (ASO) Jabodetabek dan mengalihkan ke Digital, Kamis,

(3/11) pukul 00.00 WIB.

Penghentian ditandai dengan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkum) Mahfud MD menekan tombol di layar yang ada di Posko Pemantauan Penghentian Siaran TV Analog, Jakarta.

Mahfud MD mengatakan ASO merupakan amanat Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Kata dia, dalam UU itu disebutkan migrasi penyiaran Televisi dari analog ke digital harus diselesaikan pada 2 November 2022.

"Juga migrasi siaran tv analog ke digital ini merupakan program pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital," ujarnya. ■ han



RDP KOMISI X DENGAN PLT DIRJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani memberikan paparannya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/11). Rapat tersebut membahas tentang skema seleksi GTK PPPK Tahun 2022.

## OC Kaligis Dampingi Eks Kasat Reskrim Polres Jaksel AKBP Ridwan Soplanit

JAKARTA (IM) - Pengacara kondang OC Kaligis menghadiri persidangan dugaan kasus Obstruction of Justice kematian Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatricia pada Kamis (3/11).

Dalam persidangan, Kamis (3/11), mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan ini menjadi saksi atas terdakwa Hendra dan Agus.

"Saya datang karena ada kepentingan (mendampingi) AKBP Ridwan Soplanit sebagai saksi). Soal banding akan diserahkan besok dan kita minta klien dibebaskan," kata OC Kaligis, di PN Jakarta Selatan, Kamis (3/11).

Selatan, Kamis (3/11).

OC Kaligis memberikan bantuan hukum pada mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Soplanit terkait sidang kode etik sehubungan dengan dugaan kasus pembunuhan Brigadir J. Saat sidang kode etik, Ridwan pun dijatuhi sanksi demosi delapan tahun oleh tim Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Ridwan dinilai terbukti tidak profesional melakukan penyidikan dugaan kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan tersangka Ferdys Sambo Cs. Oleh karena itu, AKBP Ridwan Soplanit bakal mengajukan banding atas sanksi tersebut, yang mana memori bandingnya bakal diserahkan pada Jumat, 4 November 2022 esok.

Pada persidangan Obstruction of Justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatricia, OC Kaligis tampak duduk di kursi pengunjung. Pasalnya, dia memiliki kepentingan guna mendampingi kliennya memberikan kesaksiannya di persidangan hari ini. ■ mei

## KPK Periksa Dua Pimpinan DPRD Sulsel Terkait Dugaan Suap Auditor BPK

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadegankan pemeriksaan terhadap dua pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (3/11). Keduanya yakni, Darmawangsa Muin dan Muzayyin Arif. Kedua legislator tersebut bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 yang menerunt auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain dua pimpinan DPRD Sulsel, penyidik juga memanggil 10 saksi lainnya yakni, empat Wirawasta, Arfa Anwar; Petrus Yalim; Andi Sudirman alias Karaeng Kodeng; dan Kasbi Suriansyah. Kemudian, Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPK Sulsel, Gilang Permata.

Selanjutnya, lima orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni, Winarti; Darusman Idham; Fitri Zainuddin; dan Julia Rendi R, serta satu Pensiunan PNS, Ayub Ali. Keterangan mereka dibutuhkan untuk sekaligus melengkapi berkas penyidikan para tersangka dalam kasus ini. "Pemeriksaan dilakukan di Kantor Sat Brimob Polda Sulsel, atas nama tersebut," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (3/11).

Sebelumnya, KPK telah lebih dulu memeriksa Ketua DPRD Sulsel, Ina Kartika Sari dalam kapasitasnya sebagai saksi pada

Senin, 24 Oktober 2022. Saat itu, Ina diperiksa bersama-sama dengan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah.

Penyidik menggali keterangan Ina Kartika dan Ni'matullah soal hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulsel yang dikelola oleh Sekretaris Dewan (Sekwan). Sejuah ini, KPK baru menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemeriksaan laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020.

Kelima tersangka tersebut yakni, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tenggara (Sultra), Andy Sonny (AS) serta tiga Auditor BPK di Sulawesi yakni, Yohanes Binur Haryanto Manik (YBHM); Wahid Ikhsan Wahyudin (WIW); serta Gilang Gumilar (GG). Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Sedangkan satu tersangka pemberi suap yakni, mantan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel, Edy Rahmat (ER). Penetapan kelima tersangka tersebut merupakan pengembangan dari perkara sehubungan dengan menjerat mantan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat. Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat telah divonis bersalah atas kasusnya.

Dalam perkara ini, empat pemeriksa BPK di Sulawesi tersebut diduga menerima suap hampir Rp3

miliar dari Sekretaris Dinas PUTR Sulsel, Edy Rahmat (ER). Yohanes, Wahid, dan Gilang diduga menerima jatah suap sebesar Rp2,8 miliar yang dibagi tiga. Sedangkan Andy Sonny, diduga kecipratan senilai Rp100 juta guna mengurus kenaikan jabatan di BPK.

Edy Rahmat menyuap para pegawai BPK tersebut berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan pada Dinas PUTR Sulawesi Selatan tahun 2020. Para pemeriksa BPK diduga diminta oleh Edy untuk memanipulasi laporan keuangan Dinas PUTR agar tidak ada temuan.

Adapun, item temuan dari Yohanes Binur Haryanto Manik antara lain adanya beberapa proyek pekerjaan yang nilai pagu anggarannya diduga di mark up dan hasil pekerjaan juga diduga tidak sesuai dengan kontrak.

Atas perbuatannya, Edy Rahmat disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Andy, Yohanes, Wahid, dan Gilang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPP. ■ mei



### RDP PEMBAHASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN KASUS SUSU FORMULA DAN OBAT SIRUP

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/11). Rapat tersebut beragendakan pembahasan perlindungan konsumen terhadap kasus susu formula dan obat sirup yang memngkibatkan adanya korban jiwa.

## 5 Tokoh Terima Gelar Pahlawan Nasional

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengatakan, pemerintah akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada lima tokoh. Kelima tokoh tersebut dipilih berdasarkan usulan masyarakat dan telah melalui sejumlah proses seleksi.

"Hari ini Bapak Presiden sudah berdiskusi dengan kami, dengan Dewan Gelar dan Tanda-Tanda Kehormatan, itu memutuskan tahun ini memberikan lima (gelar pahlawan nasional) kepada tokoh-tokoh bangsa yang telah ikut berjuang mendirikan negara Republik Indonesia, melalui perjuangan kemerdekaan dan mengisignya dengan pembangunan-pembangunan sehingga kita eksis sampai sekarang sebagai negara yang berdaulat," ujar Mahfud dalam keterangannya, Kamis (3/11/2022).

Pertama, pemerintah akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum DR. dr. H. R. Soeharto dari Jawa Tengah yang dinilai telah berjuang bersama Presiden Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan setelah kemerdekaan, almarhum DR. dr. H. R. Soeharto ikut serta dalam pembangunan sejumlah infrastruktur di Tanah Air.

"Ikut pembangunan department store syariah dan pembangunan Monumen Nasional serta Masjid Istiqlal dan pembangunan Rumah Sakit Jakarta serta salah seorang pendiri berdirinya IDI (Ikatan Dokter Indonesia)," kata Mahfud.

Pemerintah akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum KGPAA Paku Alam VIII yang merupakan Raja Paku Alam dari tahun 1937-1989.

Beberapa jasa yang telah diberikan almarhum KGPAA Paku Alam VIII antara lain bersama Sultan Hamengkubowono IX dari Keraton Yogyakarta mengintegrasikan diri pada awal kemerdekaan Republik Indonesia sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi utuh hingga saat ini.

"Sehari sesudah (kemerdekaan) itu Beliau menyatakan

bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kemudian Yogyakarta menjadi ibu kota yang kedua dari Republik ketika terjadi agresi Belanda pada tahun 1946," jelas Mahfud.

Kemudian gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada almarhum dr. Raden Rubini Natawisastro, dari Kalimantan Barat. Almarhum dr. Raden Rubini Natawisastro telah menjalankan misi kemanusiaan sebagai dokter keliling pada saat kemerdekaan.

Bahkan, kata Mahfud, almarhum bersama istrinya dijatuhi hukuman mati oleh Jepang karena perjuangannya yang gigih untuk kemerdekaan Republik Indonesia.

Keempat, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada

Sedangkan almarhum H. Salahuddin bin Talibuddin dari Maluku Utara, dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Selama 32 tahun, almarhum H. Salahuddin bin Talibuddin berjuang dan ikut membangun Indonesia berdasarkan Pancasila.

"Beliau pernah diibuang ke Boven Digul tahun 1942 dan juga diibuang ke Sawahlunto tahun 1918-1923," kata Mahfud.

Tokoh yang terakhir mendapat gelar Pahlawan Nasional adalah almarhum K.H. Ahmad Sanusi dari Jawa Barat. Almarhum Kyai Ahmad Sanusi merupakan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang belum mendapat gelar pahlawan nasional.

Ahmad Sanusi, kata Mahfud, juga tokoh Islam yang memperjuangkan dasar negara yang menghasilkan kompromi lahirnya negara Pancasila.

"Dari semula ada sisi kanan ingin menjadikan negara Islam, sisi kiri menjadikan negara sekuler, kemudian diambil jalan tengah lahir ideologi Pancasila sesudah menyetujui pencoretan tujuh kata di Piagam Jakarta," jelasnya.

Mahfud pun mengimbau kepada daerah-daerah yang merupakan asal dari para tokoh penerima gelar pahlawan nasional untuk mempersiapkan diri hadir pada peringatan Hari Pahlawan 10 November, yang rencananya akan digelar pada Senin, 7 November 2022 mendatang di Istana Negara Jakarta. ■ han

**PENGUMUMAN**  
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulir Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BARA INTI MINERAL ("Perseroan"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 03 November 2022, Nomor 03, yang dibuat di hadapan HERU SISWANTO, SH, M.Kn, Notaris di Kota Tangerang, Perseroan telah dibubarkan dan dilikuidasi tertanggal sejak tanggal 26 Oktober 2022, serta menunjuk dan mengangkat Tuan SALUSIRA INDIRA sebagai Likuidator untuk melaksanakan dan menyelesaikan segala sesuatunya sehubungan dengan proses likuidasi tersebut. Bagi para pihak yang memiliki tagihan terhadap Perseroan, dapat segera menghubungi Tim Likuidator dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini disertai dokumen asli dan lengkap ke Kantor Perseroan dengan alamat Jalan Adiprayawan 1 No. 2, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.  
Demikian pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Jakarta, 04 November 2022  
PT BARA INTI MINERAL ("Dalam Likuidasi")  
Likuidator